

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN KINERJA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN APBD: PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Alek Murtin & Mayang Darpito

E-mail : Alekmurtin@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research aims at examining the effect of board's knowledge about budget and board's performance toward local expense and income budget supervision: participation of society as moderating variable. The independent variable in this research was the board's knowledge about budget and board's performance, and the dependent variable was the local expense and income budget supervision. The samples of this research were the members of the people's representative covering the regional areas of Bantul, Sleman and Municipal Yogyakarta. The samples were taken using the purposive sampling. The result of the research show that 1) the board's knowledge about budget have positive influence on the local expense and income budget supervision, 2) board's performance has positive influence on the local expense and income budget supervision, 3) the interaction between on the board's knowledge about budget and participation of society has negative influence on the local expense and income budget supervision, 4) the interaction between on the board's performance and participation of society has negative influence on the local expense and income budgetsupervision.

Keywords: *Participation of Society, Board's Knowledge About Budget, Board's Performance, Local Expense, Income Budget Supervision.*

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya perundangan otonomi daerah tersebut, maka diharapkan DPRD akan lebih aktif dalam menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu dalam menjalankan fungsi dan perannya, diharapkan dewan memiliki kapabilitas dan kemampuan, antara lain pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Konsep sistem pemerintahan yang demokratis salah satu ciri dengan adanya partisipasi masyarakat karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Penelitian pernah dilakukan oleh Rosseptalia (2006); Coryanata dan Werimon (2007); Pusdianto (2008); serta Pramita dan Andriyani (2010) menunjukkan hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian Apbd

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pasal 1 ayat (9), mendefinisikan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengawasan APBD

Pengertian pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim dalam Pusdianto, 2008). Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan (Pramita dan Andriyani, 2010). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo dalam Pusdianto, 2008).

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman dalam Werimon, dkk, 2007). Kualitas dewan diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan.

Kinerja Dewan

Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005, pasal 1 ayat (35) mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Laporan kinerja finansial dewan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Bentuk kinerja pemerintah dalam bidang non financial adalah berupa pelayanan kepada masyarakat (Sopiah, 2008).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran daerah untuk menjamin agar arah dan kebijaksanaan umum APBD sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat daerahnya dan bukan aspirasi yang berasal dari konspirasi politik (Mardiasmo dalam Pusdianto, 2008).

Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Apbd

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rossetalia (2006); Coryanata (2007); Werimon, dkk (2007); Pusdianto (2008); Pramita dan Andriyani (2010) menunjukkan hubungan bahwa pengetahuan dewan tentang

anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengawasan APBD salah satunya pengetahuan tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dengan mengetahui tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi terjadinya kebocoran dan pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan anggaran. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD.

Hubungan Kinerja Dewan Dengan Pengawasan Apbd

Susanti dalam Sardjito dan Muthaher (2007) melakukan studi lapangan terhadap 48 manajer pusat biaya level menengah yang bekerja pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian tersebut ditemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial. Sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kinerja Dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD.

Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD

Rosseptalia (2006), Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010) pernah melakukan penelitian terhadap hubungan partisipasi masyarakat, pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan APBD. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan. Peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Hubungan Partisipasi Masyarakat Dan Kinerja Dewan Dengan Pengawasan Apbd

Arfan dan La Ane dalam Riyadi (2008) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran dan pengujian hipotesis menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam rangka mendukung peran dan fungsi dewan sebagai pemegang amanat masyarakat, maka dalam proses perencanaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik. Dewan sebagai pemegang amanat masyarakat berkewajiban untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Berdasarkan logi-

ka hipotesis diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara kinerja dewan dengan pengawasan APBD.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel Dan Skala Pengu Ku Ran

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga DPRD di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sampel penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Data penelitian ini adalah data primer. Metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara tertulis.

Teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan kriteria anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan karena komisi inilah yang berkaitan dengan APBD. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert yaitu mengukur kinerja instansi pemerintah dengan menyatakan setuju atau tidak setujuannya dan tercapai atau tidak tercapai terhadap pertanyaan yang diajukan.

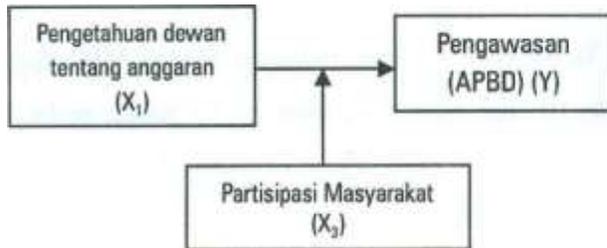
Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas adalah konsep pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Hasil uji validitas memiliki koefisien *correlation* positif dengan signifikansi maksimum 0,05

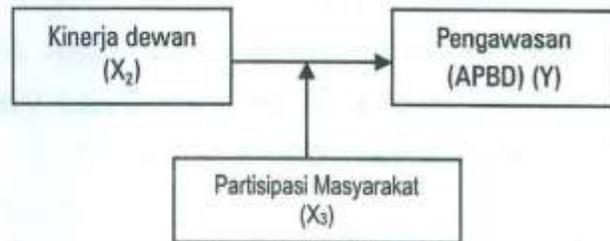
maka semua butir pertanyaan adalah valid. Uji Reliabilitas merupakan alat ukur uji untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat

dipercaya. Nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 maka semua instrumen adalah reliable (lihat lampiran).

Model 1



Model 2



Gambar 1. Model Penelitian

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dideteksi dengan uji *Kolmogorov Smirnov*. Berdasarkan model 1 dan 2 nilai *asympt sig (2-tailed)* lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*. Pada model 1 dan 2 titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya (*Variance Inflation Factor*) VIF dan *tolerance*. Hasil uji model 1 dan 2 nilai VIF >10 dan nilai *tolerance* <0.1 maka terjadi multikolinieritas.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik.

Dari hasil analisis statistic, dapat disimpulkan bahwa semua aspek mengenai uji asumsi klasik meliputi: normalitas data, heteroskedastisitas, Multikolinieritas, dan Autokorelasi sudah terpenuhi. Dengan demikian pengujian hipotesis dapat dilakukan (lihat lampiran).

Analisis Regresi Berganda Model 1

Persamaan regresi yang diperoleh (lihat table 1):

$$\text{Pengawasan APBD} = -1,780 + 1,287 \text{ PD} + 1,135 \text{ PM} - 0,234 (\text{PD} * \text{PM})$$

Tabel 1.
Ringkasan Hasil Aimalisis Regresi Berganda Model 1

Model	Unstandardized coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Contant)	-1,780	2,336	-0,762	0,448
PD	1,287	0,570	2,256	0,027
PM	1,135	0,553	2,052	0,043
PD.PM	-0,234	0,134	-1,755	0,083
F	11,231			
Sig. F	0,000			
R Square	0,291			
Adjusted R Square	0,265			

Tabel 2.
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model 2

Model	Unstandardized coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Contant)	-0,111	1,489	-0,074	0,941
K	0,912	0,364	2,508	0,014
PM	0,802	0,364	2,204	0,030
K.PM	-0,159	0,088	-1,813	0,074
F	15,748			
Sig. F	0,000			
R Square	0,366			
Adjusted R Square	0,342			

Hipotesis 1

Menguji pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. Nilai t sebesar 2,256 dan nilai koefisien regresi positif 1,287 dengan nilai sig (0,027) < a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD, maka hipotesis pertama berhasil didukung.

Hipotesis 3

Menguji pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Nilai t sebesar -1,755 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,234 dengan nilai sig (0,083) > a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga

partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating akan melemahkan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD, maka hipotesis ketiga tidak didukung.

Uji Nilai F

Hasil uji F menunjukkan F hitung sebesar 11,231 bertanda positif dengan nilai sig (0,000) < a (0,05). Ini berarti bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

Uji Determinasi

Nilai adjusted R square sebesar 0,265 atau 26,5%, hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, dan variabel moderating yaitu partisipasi masyarakat serta interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dalam menjelaskan variabel dependen yaitu pengawasan APBD, sedangkan sisanya 0,735 atau 73,5% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian.

Analisis Regresi Berganda Model 2

Persamaan regresi yang diperoleh (lihat table 2):

$$\text{Pengawasan APBD} = -0,111 + 0,912 K + 0,802 PM - 0,159 (K*PM)$$

Uji Hipotesis 2

Menguji kinerja dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. Nilai t sebesar 2,508 dan nilai koefisien regresi positif 0,912 dengan nilai sig (0,014) < a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh

positif signifikan antara kinerja dewan terhadap pengawasan APBD, maka hipotesis kedua berhasil didukung.

Uji Hipotesis 4

Menguji kinerja dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Nilai t sebesar -1,813 dan nilai koefisien regresi -0,159 dengan nilai sig (0,074) > a (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating akan melemahkan kinerja dewan terhadap pengawasan APBD, maka hipotesis keempat tidak didukung.

Ui Nilai F

Hasil uji F menunjukkan F hitung sebesar 15,748 bertanda positif dengan nilai sig (0,000) < a (0,05) . Ini berarti bahwa variabel kinerja dewan, partisipasi masyarakat dan interaksi kinerja dewan dengan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

Uji Determinasi

Nilai adjusted R square sebesar 0,342 atau 34,2%, hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu kinerja dewan, dan variabel moderating yaitu partisipasi masyarakat serta interaksi kinerja dewan dengan partisipasi masyarakat dalam menjelaskan variabel dependen yaitu pengawasan APBD, sedangkan sisanya 0,658 atau 65,8% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian.

PENUTUP

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan dewan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan APBD dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Kedua, Kinerja dewan yang sesuai dengan perencanaan dan pengendalian dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Ketiga, Aspirasi dari masyarakat masih belum bisa sepenuhnya diterima oleh dewan karena perbedaan persepsi masyarakat dengan persepsi dewan. Keempat, Anggota dewan sebagai pemegang amanat masyarakat seharusnya berkewajiban untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Karena dalam proses

Saran dari penelitian ini adalah Untuk penelitian selanjutnya pada saat pengambilan sampel hendaknya memilih sampel anggota dewan yang membidangi anggaran. Bagi para peneliti selanjutnya sebaiknya dapat melakukannya di beberapa daerah/ kota sehingga diperoleh responden atau sampel yang lebih banyak. Anggota dewan hendaknya selalu memperhatikan informasi yang diterima dari masyarakat, dan diharapkan informasi tersebut diimplementasikan sehingga terjalin keselarasan tujuan antara dewan dengan masyarakat.

Keterbatasan Masalah dari penelitian ini adalah pertama, Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari anggota dewan dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta seperti Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon

Progo dan beberapa Kota/ Kabupaten lainnya. Kedua, Pada pengujian asumsi klasik terjadi multikolinieritas, walaupun sudah diuji berulang kali. Terakhir, Penelitian ini hanya mengambil variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating namun masih ada variabel lain yang bertindak sebagai variabel pemoderasi seperti komitmen politik, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, Isma. 2004. "Pelimpahan Wewenang dan Komitmen Organisasi Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Coryanata, Isma. 2007. "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Lestiana, Suci. 2008. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Munawar., dkk. 2006. "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku,

- Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang", *Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Priyonggo, Bambang. 2010. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Atas Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pramita, Yulinda dan Andriyani, Lilik. 2010. "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Pusdianto, Sahid, Nur. 2008. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahayu, Sri., dkk. 2007. "Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Republik Indonesia. 1998. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.

- Rosseptalia, Rima. 2006. "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sardjito, Bambang dan Muthaher, Osmad. 2007. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Sopannah. 2003. "Studi Fenomenologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kesepuluh. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Werimon, Simson. dkk. 2007. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)". *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.

LAMPIRAN
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R	Sig	Keterangan
Pengetahuan dewan tentang anggaran	PD.1	0,532	0,000	Valid
	PD.2	0,434	0,000	Valid
	PD.3	0,753	0,000	Valid
	PD.4	0,589	0,000	Valid
	PD.5	0,620	0,000	Valid
	PD.6	0,519	0,000	Valid
	PD.7	0,606	0,000	Valid
	PD.8	0,600	0,000	Valid
	PD.9	0,483	0,000	Valid
	PD.10	0,468	0,000	Valid
	PD.11	0,285	0,008	Valid
Kinerja dewan	K.1	0,750	0,000	Valid
	K.2	0,827	0,000	Valid
	K.3	0,801	0,000	Valid

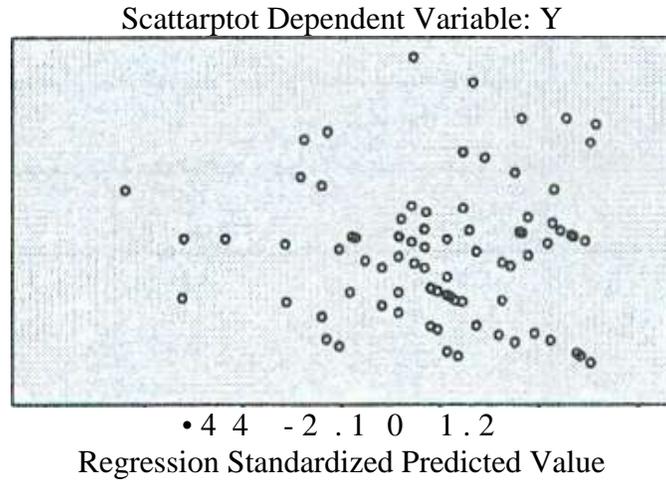
Variabel	Item	R	Sig	Keterangan
	K.4	0,860	0,000	Valid
	K.5	0,684	0,000	Valid
	K.6	0,758	0,000	Valid
Partisipasi masyarakat	PM.1	0,778	0,000	Valid
	PM.2	0,619	0,000	Valid
	PM.3	0,838	0,000	Valid
	PM.4	0,831	0,000	Valid
	PM.5	0,824	0,000	Valid
	PM.6	0,619	0,000	Valid
	PM.7	0,700	0,000	Valid
Pengawasan APBD	PA.1	0,573	0,000	Valid
	PA.2	0,640	0,000	Valid
	PA.3	0,618	0,000	Valid
	PA.4	0,559	0,000	Valid
	PA.5	0,669	0,000	Valid
	PA.6	0,563	0,000	Valid
	PA.7	0,606	0,000	Valid
	PA.8	0,529	0,000	Valid
	PA.9	0,562	0,000	Valid
	PA.10	0,654	0,000	Valid
	PA.11	0,599	0,000	Valid
	PA.12	0,425	0,000	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan dewan tentang anggaran	0,736	Reliabel
Kinerja dewan	0,868	Reliabel
Partisipasi masyarakat	0,867	Reliabel
Pengawasan APBD	0,816	Reliabel

Hasil Uji Normalitas Data

	Signifikansi	Keterangan
Model 1	0,195	Normal
Model 2	0,517	Normal



Hasil Uji Multikolinieritas Model 1

Model	Collinearit	Statistics	Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
PD	0,017	58,551	Terjadi Multikolinieritas
PM	0,013	75,411	Terjadi Multikolinieritas
PD.PM	0,006	179,253	Terjadi Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas Model 2

Model	Collinearit [^]	1 Statistics	Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
K	0,018	55,718	Terjadi Multikolinieritas
PM	0,027	36,384	Terjadi Multikolinieritas
K.PM	0,008	120,636	Terjadi Multikolinieritas